



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Jalan Laksamana Malahayati Km. 26 Aceh Besar

Telp. 0651-31363, Fax. 0651-31346

Email : supmladong@yahoo.com; 03212.427551kd@gmail.com

Website : supmladong.kkp.go.id

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis SUPM Negeri Ladong

*Dasar Hukum
Entitas dan*

*Rencana
Strategis*

SUPM Negeri Ladong didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendidik dan meluluskan SDM Kelautan dan Perikanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati Km. 26 Aceh Besar.

- Rencana Strategis SUPM Negeri Ladong
Menuju Sentra Pengembangan SDM Perikanan bertaraf Internasional di Nanggroe Aceh Darussalam dan sekitarnya
- Visi
Menjadi sentra pengembangan SDM unggul tingkat menengah di Aceh dan sekitarnya untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat
- Misi
 - 1. Menyelenggarakan pendidikan formal perikanan secara profesional sesuai kurikulum yang berlaku;*
 - 2. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan;*
 - 3. Melakukan Pembinaan karakter siswa*
 - 4. Mengelola Sarana Prasarana Diklat*
 - 5. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat*
 - 6. menyelenggarakan unit produksi perikanan*
- Indikator Kinerja
Persentase pemenuhan Tenaga Teknis Perikanan Terdidik yang Kompeten sesuai Kebutuhan dan Prioritas Nasional dengan Proses Belajar Mengajar dan Sarana Prasarana yang memenuhi standar.
- Data Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai SUPM Negeri Ladong per 31 Desember 2025 berjumlah 74 orang dengan rincian sebagai berikut :

Data Pegawai SUPM Ladong

No	Jenis Pegawai	Jumlah	Ket.
1	PNS	54	
2	PPPK	4	
3	PPPK Paruh Waktu	3	
4	PJLP	14	
	TOTAL	74	

- Aplikasi

Aplikasi yang digunakan oleh SUPM Ladong dalam mendukung kegiatan dan pelaporan terdiri atas beberapa aplikasi :

- a. Aplikasi e-Dalwas
- b. Aplikasi e-DJA
- c. Aplikasi e-Monev Bappenas
- d. Aplikasi Monsakti
- e. Aplikasi SAKTI

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan T.A. 2025 – Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh SUPM Negeri Ladong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

SUPM Negeri Ladong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan SUPM Negeri Ladong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 - Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari SUPM Negeri Ladong. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor SUPM Negeri Ladong adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada SUPM Negeri Ladang adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Uang Pendidikan diakui setelah Penyetoran dilaksanakan atau Bulan bersangkutan berakhir
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlah bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan pensisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian		Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo		0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan		10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan		50%
Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta

Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat Aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.05/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas bulan setelah tanggal pelaporan).
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, SUPM Negeri Ladong mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Pagu senilai Rp11.864.195.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	DIPA AWAL	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	105.464.000	105.464.000
Jumlah Pendapatan	105.464.000	105.464.000
Belanja		
Belanja Pegawai	8.284.605.000	8.284.605.000
Belanja Barang	4.910.800.000	3.579.590.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	13.195.405.000	11.864.195.000

Realisasi
Pendapatan
Rp43.036.914

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp43.036.914,00 atau mencapai 40,81 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp105.464.000,00. Pendapatan SUPM Negeri Ladong terdiri dari Pendapatan Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 DESEMBER 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	90.200.000	19.270.000	21,36
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	1.022.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	15.264.000	3.500.000	22,93
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	18.978.088	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	266.826	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Jumlah	105.464.000	43.036.914	40,81

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 105,39 persen dibandingkan dengan realisasi pendapatan PNPB pada TA 2024. Pendapatan disetor melalui Potongan SPM sebesar Rp17.205.119,00 dan melalui SIMPONI sebesar Rp25.831.795,00 dengan rincian sebagai berikut :

** Potongan melalui SPM :

1. Sewa Rumah Dinas Bulan Januari s/d Desember 2025 sebesar Rp16.938.293,00
2. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp266.826

** Pendapatan melalui setoran SIMPONI

1. Sewa Rumah Dinas Januari s/d Desember 2025 sebesar Rp2.039.795,00
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp3.500.000,00
3. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp1.022.000,00
4. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya sebesar Rp19.270.000,00

Dasar Hukum dan tarif pemotongan untuk pendapatan Sewa Rumah Dinas berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 Tanggal 16 Juli 2011 tentang Sewa Rumah Negara.

Sedangkan dasar hukum dan tarif pemotongan hasil samping pendidikan dan Pendapatan pendidikan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Realisasi Belanja
Negara

Rp11.655.437.931

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2025 adalah sebesar Rp11.655.437.931,00 atau 98,24 persen dari anggaran belanja sebesar Rp11.864.195.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	8.284.605.000	8.169.301.408	98,61
Belanja Barang	3.579.590.000	3.486.136.523	97,39
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	11.864.195.000	11.655.437.931	98,24
Pengembalian Belanja		-	0
Belanja Netto	11.864.195.000	11.655.437.931	98,24

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 10,68 persen. Hal ini disebabkan berkurangnya pagu pada semua jenis belanja dan efisiensi anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8.169.301.408	8.126.131.182	0,53
Belanja Barang	3.486.136.523	4.456.612.398	(21,78)
Belanja Modal	-	466.244.000	(100,00)
Jumlah	11.655.437.931	13.048.987.580	(10,68)

*Belanja Pegawai
Rp8.169.301.408*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8,169.301.408,00 dan Rp8.126.131.182,00. Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 0.53 persen dari Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain adanya 1 orang pegawai pensiun dan jumlah hari kerja pada pembayaran uang makan PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.979.733.429	8.007.695.096	(0,35)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	189.568.199	126.220.156	50,19
Jumlah Belanja Kotor	8.169.301.628	8.133.915.252	0,44
Pengembalian Belanja Pegawai	(220)	(7.784.070)	
Jumlah Belanja	8.169.301.408	8.126.131.182	0,53

*Belanja Barang
Rp3.486.136.523*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.486.136.523,00 dan Rp4.456.612.398,00. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 21,78 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini antara lain karena adanya kebijakan pemerintah berupa efisiensi anggaran tahun 2025..

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.153.999.325	1.468.953.930	(21,44)
Belanja Barang Non Operasional	855.875.361	1.158.275.600	(26,11)
Belanja Jasa	1.101.679.748	621.726.348	77,20
Belanja Pemeliharaan	210.861.825	479.983.155	(56,07)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	129.673.264	700.336.365	(81,48)
Belanja Barang Persediaan Konsumsi	34.172.000	28.533.000	19,76
Jumlah Belanja Kotor	3.486.261.523	4.457.808.398	(21,79)
Pengembalian Belanja	(125.000)	(1.196.000)	
Jumlah Belanja	3.486.136.523	4.456.612.398	(21,78)

Belanja Modal
Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp466.244.000,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	66.674.000	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	0	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	399.570.000	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	0	0	100,00
Jumlah Belanja Kotor	0	466.244.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	0	466.244.000	(100,00)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP.

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.2 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Persediaan
Rp7.531.000

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.531.000,00 dan Rp12.923.000,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Desember 2025	2024
Barang Konsumsi	3.905.000	7.489.000
Persediaan Lainnya	3.626.000	5.434.000
Jumlah	7.531.000	12.923.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan telah dilakukan opname fisik dengan Berita Acara Nomor B.1187.1/SUPM.LD/PL.510/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025.

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki SUPM Negeri Ladong per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp14.720.155.000. Aset berupa Tanah tersebut terletak di Jl Laksamana Malahayati Km. 26 Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2025.

Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Uraian	Luas	Nilai	Keterangan
1	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	83.337 m2	9.873.130.000	Tersertifikasi
2	1	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	51.909 m2	3.753.775.000	Tersertifikasi
3	1	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	12.010 m2	900.750.000	Dalam proses sertifikat
4	1	Tanah Persil Lainnya	5.500 m2	192.500.000	Dalam proses sertifikat
Jumlah				14.720.155.000	

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024		14.720.155.000
Mutasi tambah:		
Hibah (Masuk) (103)		0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205)		0
Pengembangan Nilai Aset (202)		0
Mutasi kurang:		0
Koreksi Kesalahan Input IP (225)		0
Saldo per 31 Desember 2025		14.720.155.000

Tidak ada Mutasi transaksi Tanah selama periode sampai dengan 31 Desember 2025.

Rincian aset tetap Tanah disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp14.616.362.341,00 dan Rp14.616.362.341,00,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	14.616.362.341
Mutasi tambah:	
Pembelian (101)	0
Reklasifikasi Masuk (107)	229.091.177
Pengembangan Nilai Aset (202)	0
Mutasi kurang:	0
Reklasifikasi Keluar (304)	-229.091.177
Saldo per 31 Desember 2025	14.616.362.341
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-13.846.195.779
Nilai Buku per 31 Desember 2025	770.166.562

Selama periode TA 2025 dilakukan Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk untuk menyesuaikan kodefikasi barang sesuai dengan SK Nomor B.1025/SUPM.LDG/PL.760/X/2025 Tanggal 21 Oktober 2025 dengan rincian sebagai berikut :

** Reklasifikasi Keluar (304)

No	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	Alat Khusus SAR (Search And Rescue)	1	(11.127.050)
2	Tali Sandang	1	(20.899.575)
3	Dinamo Exploder	1	(24.200.000)
4	Trawing Anchor	1	(9.452.000)
5	Breathing Apparatus	5	(53.250.000)
6	Fire Gun	6	(10.824.352)
7	Ultra Violet Viewing Box and Lampu Ultraviolet	3	(3.240.000)
8	Neraca Analitis	1	(9.462.200)
9	GPS	3	(49.806.000)
10	Dehidrate	1	(7.430.000)
11	Anti Petrefacton Mask	3	(1.650.000)
12	Chest Freezer	1	(27.750.000)
	JUMLAH	27	(229.091.177)

** Reklasifikasi Masuk (107)

No	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	Tanks (Tabung Selam)	5	53.250.000
2	Jangka Besi	1	9.452.000
3	Analytical Balance (Neraca Analitik)	1	9.462.200
4	Cold Storage (Alat Pendingin)	1	27.750.000
5	Lampu Emergency	3	3.240.000
6	GPS Receiver	3	49.806.000
7	Radar Lainnya	1	11.127.050
8	Fire Extinghuizer	6	10.824.352
9	Mesin Pengering	1	7.430.000
10	Altenator	1	24.200.000
11	Masker Gas	3	1.650.000
12	Sabuk Pengaman Lainnya	1	20.899.575
	JUMLAH	27	229.091.177

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6 Gedung dan Bangunan

Rp24.587.232.834

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp24.587.232.834,00 dan Rp24.587.232.834,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal pelaporan adalah :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	24.587.232.834
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (105)	-
Pengembangan Melalui KDP (208)	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Kesalahan Input IP (225)	-
Koreksi Nilai Barang Berlebih (245)	-
Saldo per 31 Desember 2025	24.587.232.834
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(5.843.817.499)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	18.743.415.335

Tidak ada Mutasi transaksi Aset Gedung dan Bangunan selama periode sampai dengan 31 Desember 2025.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Irigasi

Rp2.746.388.770

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.746.388.770,00 dan Rp2.746.388.770,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan tanggal pelaporan adalah :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.746.388.770
Mutasi tambah:	
Koreksi Kesalahan Input IP (255)	-
Pengembangan melalui KDP (208)	-
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi Keluar (304)	-
Saldo per 31 Desember 2025	2.746.388.770
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(2.144.030.587)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	602.358.183

Tidak ada Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama periode sampai dengan 31 Desember 2025.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan in.

Aset Tetap Lainnya

Rp652.890.826

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp652.890.826,00 dan Rp652.890.826,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	652.890.826
Mutasi tambah:	
Pembelian (101)	-
Pengembangan melalui KDP (208)	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223)	-
Saldo per 31 Desember 2025	652.890.826
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(284.435.875)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	368.454.951

Tidak ada Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya selama periode sampai dengan 31 Desember 2025.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap

(Rp22.118.479.740)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp22.118.479.740,00) dan (Rp20.650.237.288,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	14.616.362.341	13.846.195.779	770.166.562
2	Gedung dan Bangunan	24.587.232.834	5.843.817.499	18.743.415.335
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.746.388.770	2.144.030.587	602.358.183
4	Aset Tetap Lainnya	652.890.826	284.435.875	368.454.951
Jumlah		42.602.874.771	22.118.479.740	20.484.395.031

C.10 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp414.258.930

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp414.258.930,00 dan Rp414.258.930,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Barang dalam kondisi rusak tersebut belum bisa dihapuskan dikarenakan belum dilakukan PSP terhadap barang-barang tersebut senilai Rp414.258.930,00. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	414.258.930
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya (188)	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN (yang dihentikan) (391)	-
Saldo per 31 Desember 2025	414.258.930
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(414.258.930)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp414.258.930)

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing (Rp414.258.930,00) dan (Rp414.258.930,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	409.160.800	409.160.800	0
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	5.098.130	5.098.130	0
Jumlah	414.258.930	414.258.930	0

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp9.540.138*

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp9.540.138,00 dan Rp123.240.083,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kepada Pihak Ketiga berupa Tagihan PLN dan Telkom Pemakaian Bulan Desember 2025 senilai Rp9.540.138,00 (tagihan terlampir)

*Pendapatan Diterima
Dimuka Rp3.208.333*

C.13 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.208.333,00 dan Rp0,00. Pendapatan diterima dimuka merupakan sewa gedung dapur untuk 12 bulan mulai Desember 2025 sd November 2026 sesuai dengan perjanjian sewa Nomor B.1162/SUPM.LDG/PL.270/XII/2025 Tanggal 16 Desember 2025 senilai Rp3.500.000,00 dan yang sudah diakui sebagai pendapatan sebesar Rp291.667,00.

*Ekuitas
Rp35.199.332.560*

C.14 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp35.199.332.560,00 dan Rp36.662.410.400,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp39.828.581

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp39.828.581,00 dan Rp143.075.667,00.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	TA 2025	TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	19.270.000	96.114.600	(100,00)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	1.022.000	24.975.000	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	291.667	19.086.067	(100,00)
Pendapatan Biaya Pendidikan	-	2.900.000	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	18.978.088	-	100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	266.826	-	100,00
Jumlah	39.828.581	143.075.667	(72,16)

Pendapatan Pengelolaan BMN merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan Pengelolaan BMN yang merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Tupoksi SUPM Negeri Ladong.

Beban Pegawai
Rp8.169.301.408

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.169.301.408,00 dan Rp8.137.184.922,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	7.979.733.209	8.075.582.578	(1,19)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	189.568.199	61.602.344	207,73
Jumlah	8.169.301.408	8.137.184.922	0,39

Beban Persediaan
Rp39.564.000

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp39.564.000,00 dan Rp32.498.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	28.756.000	25.083.000	14,64
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	10.808.000	7.415.000	45,76
Jumlah Beban Persediaan	39.564.000	32.498.000	21,74

Beban Barang
dan Jasa
Rp3.097.664.489

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.097.664.489,00 dan Rp3.249.474.724,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Belanja Operasional	1.153.874.325	1.468.953.930	-21,45
Beban Belanja Non Operasional	855.875.361	1.158.275.600	-26,11
Beban Jasa	1.087.914.803	622.245.194	74,84
Jumlah	3.097.664.489	3.249.474.724	-4,67

Beban
Pemeliharaan
Rp210.861.825

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp210.861.825,00 dan Rp480.833.155,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.580.000	172.046.000	(99,08)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	188.781.825	268.053.206	(29,57)
Beban Pemeliharaan Jaringan	20.500.000	39.883.949	(48,60)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	850.000	(100,00)
Jumlah	210.861.825	480.833.155	(56,15)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp129.673.264

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp129.673.264,00 dan Rp699.140.365,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	9.995.264	506.110.365	-98,03
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	119.678.000	193.030.000	100,00
Jumlah	129.673.264	699.140.365	-81,45

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.486.481.645

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.486.481.645,00 dan Rp1.641.643.980,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2025	31 Desember 2025	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	495.649.576	656.069.410	(24,45)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	753.866.801	748.609.302	0,70
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	189.169.663	189.169.663	-
Beban Penyusutan Irigasi	27.362.151	27.362.151	-
Beban Penyusutan Jaringan	12.890.704	12.890.704	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.542.750	7.542.750	-
Jumlah Penyusutan	1.486.481.645	1.641.643.980	(9,45)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.486.481.645	1.641.643.980	(9,45)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp55.269,00). Beban penyisihan piutang tak tertagih adalah perkiraan manajemen mengenai jumlah piutang yang tidak akan dibayar oleh pelanggan. Ini juga dikenal sebagai penyisihan piutang tak tertagih atau cadangan utang tak tertagih.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lain	-	(55.269)	(100,00)
	-	-	-
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	(55.269)	(100,00)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	11.053.743	(100,00)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	11.053.743	(100,00)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	
Beban Persediaan Rusak/Usang	0	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	-	#DIV/0!
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	11.053.743	(100,00)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	11.053.743	(100,00)

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp36.662.410.400*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp36.662.410.400,00 dan Rp37.854.142.697,00.

*Defisit LO
Rp13.093.718.050*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.093.718.050,00 dan Rp14.086.590.467,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Tidak Ada Transaksi

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Tidak Ada Transaksi

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Tidak Ada Transaksi

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Tidak Ada Transaksi.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp18.239.193*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah penyesuaian atau perbaikan atas pencatatan nilai aset tetap yang tidak disebabkan oleh penilaian kembali (revaluasi), melainkan karena adanya perubahan kodefikasi barang (Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk) atau penyesuaian lain yang sifatnya korektif untuk mengembalikan nilai aset ke nilai yang semestinya sebesar Rp18.239.193.00.

Lain-lain Rp0,00

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Tidak Ada Transaksi

Transaksi Antar
Entitas

Rp11.612.401.017

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11,612,401,017,00 dan Rp12.894.858.170,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	11.655.437.931
Diterima dari Entitas Lain	(43.036.914)
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	11.612.401.017

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp11.655.437.931,00 sedangkan DDEL sebesar Rp43.036.914,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Tidak Ada Transaksi

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Tidak Ada Transaksi

Ekuitas Akhir

Rp35.199.332.560

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp35.199.332.560,00 dan Rp36.662.410.400,00

G. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

G.1 KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan DIPA/DIPA Revisi Tahun 2025, Satker SUPM Ladong tidak mengelola anggaran yang terkait dengan Program Prioritas Nasional sebagaimana diatur dalam pedoman penyusunan Laporan Keuangan. Oleh karena itu, tidak ada data capaian output Prioritas Nasional yang disajikan pada tahun ini.

G.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F. PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI OUTPUT

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong antara lain sebagai berikut :

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kementerian Negara/Lembaga : Kelautan dan Perikanan (032)
Unit Organisasi : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP (12)
Satuan Kerja : Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong (427551)
Fungsi : Ekonomi (04)
Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (04.03)
Program : Program Dukungan Manajemen (WA)
Lokasi : Aceh Besar

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Ekonomi								
03	Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan								
WA	Program Dukungan Manajemen								
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan								
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.953.097.000	9.823.455.526	98,70					
962	Layanan Umum	1.620.000	1.620.000	100,00	1	1	Layanan	100,00	Selesai
994	Layanan Perkantoran	9.951.477.000	9.821.835.526	98,70	1	1	Layanan	100,00	Selesai
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.000.000	6.000.000	100,00					
955	Layanan Manajemen Keuangan	6.000.000	6.000.000	100,00	1	1	Dokumen	100,00	Selesai
	Sub Total	9.959.097.000	9.829.455.526	98,70					
	Penyesuaian (Revisi DIPA / Pengembalian Belanja/dll*)								
	Total	9.959.097.000	9.829.455.526	98,70					

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kementerian Negara/Lembaga : Kelautan dan Perikanan (032)
Unit Organisasi : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP (12)
Satuan Kerja : Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong (427551)
Fungsi : Pendidikan (10)
Sub Fungsi : Pendidikan Tinggi (10.06)
Program : Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (DL)
Lokasi : Aceh Besar

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Pendidikan								
06	Pendidikan Tinggi								
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi								
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan								
SAC	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	1.905.098.000	1.825.982.625	95,85					
811	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1.905.098.000	1.825.982.625	95,85	85	85	Orang	100,00	Selesai
	Sub Total	1.905.098.000	1.825.982.625	95,85					
	Penyesuaian (Revisi DIPA / Pengembalian Belanja/dll*)								
	Total	1.905.098.000	1.825.982.625	95,85					

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (427551) SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

Tgl Data : 29/04/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 29/04/26 10:12 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	39,828,581	143,075,667	(103,247,086)	(72.163)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	39,828,581	143,075,667	(103,247,086)	(72.163)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	39,828,581	143,075,667	(103,247,086)	(72.163)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	8,169,301,408	8,137,184,922	32,116,486	0.395
Beban Persediaan	39,564,000	32,498,000	7,066,000	21.743
Beban Barang dan Jasa	3,097,664,489	3,249,474,724	(151,810,235)	(4.672)
Beban Pemeliharaan	210,861,825	480,833,155	(269,971,330)	(56.147)
Beban Perjalanan Dinas	129,673,264	699,140,365	(569,467,101)	(81.452)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (427551) SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

Tgl Data : 29/04/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 29/04/26 10:12 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,486,481,645	1,641,643,980	(155,162,335)	(9.452)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(55,269)	55,269	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	13,133,546,631	14,240,719,877	(1,107,173,246)	(7.775)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(13,093,718,050)	(14,097,644,210)	1,003,926,160	(7.121)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	11,053,743	(11,053,743)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	11,053,743	(11,053,743)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	11,053,743	(11,053,743)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(13,093,718,050)	(14,086,590,467)	992,872,417	(7.048)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(13,093,718,050)	(14,086,590,467)	992,872,417	(7.048)

Keterangan :
FINAL

Aceh Besar, 29 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HARUN
NIP. 196811101999031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (427551) SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

Tgl Data : 29/04/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 10:14 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	36,662,410,400	37,854,142,697	(1,191,732,297)	(3.15)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13,093,718,050)	(14,086,590,467)	992,872,417	(7.05)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	18,239,193	0	18,239,193	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	18,239,193	0	18,239,193	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	11,612,401,017	12,894,858,170	(1,282,457,153)	(9.95)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,463,077,840)	(1,191,732,297)	(271,345,543)	22.77
EKUITAS AKHIR	35,199,332,560	36,662,410,400	(1,463,077,840)	(3.99)

Keterangan :

FINAL

Aceh Besar, 29 April 2026

Pemangung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HARUN

NIP.196811101999031003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG 427551

Tgl Data : 29/04/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 29/04/26 10:15 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	105,464,000	43,036,914	(62,427,086)	40.81	105,364,000	154,129,410	48,765,410	146.28
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	105,464,000	43,036,914	(62,427,086)	40.81	105,364,000	154,129,410	48,765,410	146.28
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	105,464,000	43,036,914	(62,427,086)	40.81	105,364,000	154,129,410	48,765,410	146.28
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	11,864,195,000	11,655,437,931	(208,757,069)	98.24	13,148,075,000	13,048,987,580	(99,087,420)	99.25
1. Belanja Pegawai	8,284,605,000	8,169,301,408	(115,303,592)	98.61	8,214,889,000	8,126,131,182	(88,757,818)	98.92
2. Belanja Barang	3,579,590,000	3,486,136,523	(93,453,477)	97.39	4,466,512,000	4,456,612,398	(9,899,602)	99.78
3. Belanja Modal	0	0	0	0	466,674,000	466,244,000	(430,000)	99.91
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN 12
SATUAN KERJA : SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG 427551

Tgl Data : 29/04/26 7:30 AM
Tgl Cetak : 29/04/26 10:15 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	11,864,195,000	11,655,437,931	(208,757,069)	98.24	13,148,075,000	13,048,987,580	(99,087,420)	99.25
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Aceh Besar, 29 April 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HARUN
NIP. 196811101999031003



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (427551) SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

Tgl Data : 29/04/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 10:15 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	7,531,000	12,923,000	(5,392,000)	(41.72)
JUMLAH ASET LANCAR	7,531,000	12,923,000	(5,392,000)	(41.72)
ASET TETAP				
Tanah	14,720,155,000	14,720,155,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	14,616,362,341	14,616,362,341	0	0.00
Gedung dan Bangunan	24,587,232,834	24,587,232,834	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,746,388,770	2,746,388,770	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	652,890,826	652,890,826	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(22,118,479,740)	(20,650,237,288)	(1,468,242,452)	7.11
JUMLAH ASET TETAP	35,204,550,031	36,672,792,483	(1,468,242,452)	(4.00)
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	99,935,000	(99,935,000)	(100.00)
Aset Lain-lain	414,258,930	414,258,930	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(414,258,930)	(414,258,930)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	99,935,000	(99,935,000)	(100.00)
JUMLAH ASET	35,212,081,031	36,785,650,483	(1,573,569,452)	(4.28)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	9,540,138	123,240,083	(113,699,945)	(92.26)
Pendapatan Diterima Dimuka	3,208,333	0	3,208,333	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12,748,471	123,240,083	(110,491,612)	(89.66)
JUMLAH KEWAJIBAN	12,748,471	123,240,083	(110,491,612)	(89.66)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	35,199,332,560	36,662,410,400	(1,463,077,840)	(3.99)
JUMLAH EKUITAS	35,199,332,560	36,662,410,400	(1,463,077,840)	(3.99)
JUMLAH EKUITAS	35,199,332,560	36,662,410,400	(1,463,077,840)	(3.99)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	35,212,081,031	36,785,650,483	(1,573,569,452)	(4.28)

Keterangan :

FINAL

Aceh Besar, 29 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HARUN

NIP. 196811101999031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (427551) SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG Tgl Data : 29/04/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 10:15 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,905,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	3,626,000	0
0.0	131111	Tanah	14,720,155,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	14,616,362,341	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	24,587,232,834	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,740,631,370	0
0.0	134112	Irigasi	702,261,000	0
0.0	134113	Jaringan	303,496,400	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	652,890,826	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	13,846,195,779
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	5,843,817,499
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,646,046,539
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	237,065,850
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	260,918,198
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	284,435,875
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	409,160,800	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5,098,130	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	409,160,800
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	5,098,130
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	9,540,138
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	3,208,333
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	11,655,437,931
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	43,036,914	0
0.0	391111	Ekuitas	0	36,662,410,400
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	18,239,193
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	19,270,000
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	1,022,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	291,667
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	18,978,088
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	266,826
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,075,432,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	43,793	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	251,516,900	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	78,767,094	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	96,780,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	21,363,175	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (427551) SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

Tgl Data : 29/04/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 10:15 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	175,473,660	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	451,474,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	94,265,000	0
3.0	511152	Beban Tunjangan Profesi Guru	329,845,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	69,731,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,544	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,506,900	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	602,760	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,969,220	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	9,596,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	1,635,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	275,972,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,121,240,587	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	95,964,975	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	195,234,825	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	870,940,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	79,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	87,620,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	279,612,200	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	576,263,161	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	261,040,900	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,400,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	62,393,503	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	70,698,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	691,382,400	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,580,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	188,781,825	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	20,500,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9,995,264	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	119,678,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	495,649,576	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	753,866,801	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	189,169,663	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	27,362,151	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	12,890,704	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7,542,750	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	28,756,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (427551) SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

Tgl Data : 29/04/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 10:15 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	10,808,000	0
JUMLAH			70,921,403,246	70,921,403,246

Keterangan :

FINAL



Aceh Besar, 29 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HARUN

NIP. 496811101999031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (427551) SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

Tgl Data : 29/04/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 10:16 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	11,655,437,931
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	43,036,914	0
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	19,270,000
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	1,022,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,500,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	18,978,088
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	266,826
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,075,432,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44,013	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	251,516,900	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	78,767,094	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	96,780,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	21,363,175	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	175,473,660	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	451,474,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	94,265,000	0
3.0	511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru	329,845,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	69,731,800	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,544	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,506,900	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	602,760	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,969,220	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	9,596,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,635,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	275,972,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,121,240,587	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	95,964,975	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	195,359,825	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	870,940,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	79,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	87,620,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	279,612,200	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	576,263,161	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34,172,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	271,200,000	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,400,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (427551) SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG

Tgl Data : 29/04/26 6:34 AM

Tgl Cetak : 29/04/26 10:16 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	65,999,348	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	70,698,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	691,382,400	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,580,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	188,781,825	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	20,500,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,995,264	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	119,678,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	220
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	125,000
JUMLAH			11,698,600,065	11,698,600,065

Keterangan :

FINAL

Aceh Besar, 29 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN TA 2025 - AUDITED

Kode dan Nama UAKPA : (427551) SUPM Ladong
Kode dan Nama UAPPAW : (0600) Aceh
Kode dan Nama Eselon 1 : (12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP
Kode dan Nama K/L : (032) Kelautan dan Perikanan

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
	Seharusnya		
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
	Seharusnya		
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	V	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	V	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
	Seharusnya		
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
	Seharusnya		
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V	Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
	Seharusnya		
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	V	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak

6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xx/422xx/423xx dan 425xx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		V	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		V	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		V	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xx) jika Hibah Uang		V	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak

	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas ?	V		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	V		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	V		Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah			Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxx), beban subsidi (55xxx), beban hibah (56xxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya

	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?			Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?			Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?			Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?			Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)			Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)			Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya

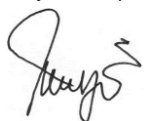
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang **TIDAK SEHARUSNYA**, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

--

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



(Muhyiddin, S.E)
NIP. 197801282003121004

Aceh Besar, 31 Desember 2025
Penelaah,



(Muhammad Husin, S.Pi)
NIP. 197705012003121003